

## **ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PADAT KARYA DI KECAMATAN MAGELANG UTARA**

**Devi Tri Meilinawati**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

Email : [meilinadevi@gmail.com](mailto:meilinadevi@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Partisipasi masyarakat adalah perwujudan keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara langsung dan tidak langsung dengan kesadaran dan pertanggungjawaban dari masyarakat tentang pentingnya proses perencanaan dan pembangunan sehingga dapat berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi, khususnya dalam Program Padat Karya di Kecamatan Magelang utara pada Kelurahan Kramat Utara. Rumusan masalah adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam Program Padat Karya di Kecamatan Magelang Utara.*

*Tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari data dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Magelang Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam melakukan analisis bentuk partisipasi masyarakat dengan menggunakan 4 tahap yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan, dan partisipasi dalam evaluasi. Kemudian dari bentuk partisipasi tersebut akan nampak tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Magelang Utara khususnya pada Kelurahan Kramat Utara yaitu tingkat partisipasinya tinggi didukung dengan kehadiran dalam setiap rapat, memberikan ide untuk merumuskan kegiatan, mempunyai kesadaran individu yang tinggi dan aktif dalam melaksanakan kegiatan. Pentingnya menganalisis partisipasi masyarakat dalam Program Padat Karya di Kecamatan Magelang Utara yaitu diharapkan masyarakat yang partisipatif, tanggap terhadap kebutuhan, aktif, dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan atau program pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan menambah penghasilan masyarakat.*

**Kata Kunci :** Partisipasi masyarakat, Tingkat partisipasi masyarakat, Program Padat Kar

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat (Nurwati, 2008). Kemiskinan juga merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah perkotaan, hingga saat ini permasalahan kemiskinan belum bisa diselesaikan. Pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PPKP), dengan salah satu programnya melalui Program Padat Karya Perkotaan (PKP).

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan tingkat pengangguran berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3 tentang Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur perintah, pekerjaan, dan upah. Pemerintah berusaha untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam Program Padat Karya.

Partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat itu sendiri. Asumsi dasar pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dianggap mampu memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam

rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakat. Anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga mampu menghilangkan sebagian ketergantungan terhadap pemerintah. (Adisasmita, 2006:36).

Kedua prinsip yang menjadi inti dari pemberdayaan Padat Karya Perkotaan, yakni partisipasi dan kemandirian. Pelaksanaan program dan pembangunan kelurahan berpengaruh kuat dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat (Supriyadi, 2010:152). Partisipasi dari setiap bagian kelurahan sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai kebutuhan kelurahan itu sendiri. Masyarakat turut berpartisipasi secara aktif diharapkan kegiatan selanjutnya dapat melaksanakannya atas kemauan dan kemampuannya sendiri.

Keberhasilan yang didapat dari program tersebut tentu pemerintah telah menjamin kesejahteraan rakyatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial di semua daerah salah satunya yakni Kota Magelang.

Kota Magelang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang terbagi menjadi tiga kecamatan yakni Magelang Utara, Magelang Tengah, dan Magelang Selatan. Penelitian ini terfokus pada Kecamatan Magelang Utara

dengan jumlah penduduk di tahun 2017 yakni 39.038 jiwa. Kepadatan masyarakat menjadikan ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja, sehingga banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang mengakibatkan adanya peningkatan pengangguran.

1.1. Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin, 2015- Agustus 2017 (%).

| Wilayah       | 2015  | 2016  | 2017  |
|---------------|-------|-------|-------|
| Kota Magelang | 6,43% | 5,51% | 6,68% |

Sumber : BPS Kota Magelang, 2015-2017

Berdasarkan data tersebut bahwa tingkat pengangguran di Kota Magelang yakni 6,68% per- akhir Bulan Agustus 2017, maka tingkat pengangguran sebesar

6,68% tergolong tinggi dari tahun sebelumnya.

Mengacu Perda No. 14 tahun 2016 tentang APBD Kota Magelang tahun Anggaran 2017, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Magelang, selaku penyelenggara program pada pelaksanaannya ada dua jenis program Padat Karya yakni program Padat Karya Non Bahan dan program Padat Karya Infrastruktur. Padat Karya Non Bahan merupakan kegiatan dengan pembersihan walet (lumpur) serta sampah di

sepanjang sungai-sungai sesuai dengan kondisi lokasi kelurahan masing-masing, sedangkan Padat Karya Infrastruktur merupakan kegiatan dengan pembangunan pembuatan bodi jalan serta pengerasan jalan dengan rabat beton, talud/pondasi, dan lain-lain sesuai dengan kondisi lokasi kelurahan masing-masing. Dengan melibatkan 3 Kecamatan atau 17 Kelurahan se-Kota Magelang. Salah satu kecamatan yang menjadi sasaran peneliti dalam pelaksanaan program padat karya yakni Kecamatan Magelang Utara. Adapun jumlah pekerja yang menjadi partisipan dalam pelaksanaan program padat karya yakni sebagai berikut:

1.2. Tabel Jumlah masyarakat yang mengikuti Program Padat Karya Di Kecamatan Magelang Utara

| No.               | Kelurahan                | Jumlah Pekerja |               |
|-------------------|--------------------------|----------------|---------------|
|                   |                          | Non Bahan      | Infrastruktur |
| 1.                | Kelurahan Wates          | 64 Orang       | 34 Orang      |
| 2.                | Kelurahan Potrobangsari  | 64 Orang       | 34 Orang      |
| 3.                | Kelurahan Kedungsari     | 64 Orang       | 34 Orang      |
| 4.                | Kelurahan Kramat Utara   | 64 Orang       | 34 Orang      |
| 5.                | Kelurahan Kramat Selatan | 64 Orang       | 34 Orang      |
| Total Keseluruhan |                          | 490 Orang      |               |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2017.

Dari tabel tersebut dapat diketahui jumlah masyarakat yang mengikuti program padat karya tiap-tiap kelurahan yakni 64 Orang untuk Padat Karya Non Bahan dan 34 Orang untuk Padat Karya Infrastruktur dari jumlah pengangguran terbuka keseluruhan di Kecamatan Magelang Utara sebesar 490 Orang. Sasaran dari program padat karya ini yaitu tenaga kerja penganggur (angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan) dan setengah

penganggur (angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap tetapi masih mencari pekerjaan) dari keluarga miskin, bukan dari kalangan pensiunan yang terkena dampak krisis

ketenagakerjaan dari korban PHK, kehilangan kesempatan kerja, dan lainnya. Usia maksimal untuk mengikuti kegiatan padat karya berumur 17 sampai 64 tahun. Sehingga pentingnya menganalisis partisipasi masyarakat dalam Program Padat Karya di Kecamatan Magelang Utara yaitu diharapkan masyarakat yang partisipatif, tanggap terhadap kebutuhan, aktif, dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan atau program pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan menambah penghasilan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti “**Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Padat Karya Di Kecamatan Magelang Utara.**”

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Pemberdayaan Masyarakat**

World Bank (dalam Mardikanto dan Soebiato 2013:28), Pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta metoda produk, tindakan, dll). Yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Subejo dan Narimo (dalam Mardikanto dan Soebiato 2013:32) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat local dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collection action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan

kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Sumodiningrat (2003:33-34), menyatakan Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa: modal teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

### **Partisipasi**

Bornby (dalam Mardikanto dan Soebiato 2013:81) mengartikan partisipasi

sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat, Webster (dalam Mardikanto dan Soebiato 2013:81). Dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri, Theodorson (dalam Mardikanto dan Soebiato 2013 :81). Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial

antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain, Raharjo (dalam Mardikanto dan Soebiato 2013:81).

Beal (dalam Mardikanto dan Soebiato 2013:81) menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar merupakan gejala yang dapat di indikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogeneous change*). Karakteristik dari partisipasi ini adalah semakin mantapnya jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Karena itu, partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Verhagen (dalam Mardikanto dan Soebiato 2013:81) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggungjawab, dan manfaat. tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

- Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki
- Kondisi tersebut dapat diperbarui melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri
- Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan
- Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan

Dalam kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya

pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya melalui partisipasi yang diberikan berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Sumaryadi (2010: 46), Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pidarta (dalam Irene 2011:50), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental, emosi, fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut tanggung jawab atas kelompok itu.

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman (dalam Irene 2011:51) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama. Pengertian sederhana tentang partisipasi d

kemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriyadi (2001: 201-202), partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka

sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dari beberapa pakar atau para ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah perwujudan keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara langsung dan tidak langsung dengan kesadaran dan pertanggungjawaban dari masyarakat tentang pentingnya proses perencanaan dan pembangunan sehingga dapat berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

#### **Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Menurut Sundariningrum (dalam Sugiyah 2001:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

##### **a. Partisipasi Langsung**

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

##### **b. Partisipasi tidak langsung**

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Partisipasi masyarakat adalah penentuan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta mengambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Syafiie, 2001:142). Partisipasi dapat menentukan

sikap dan keterlibatan setiap individu dalam organisasi, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Partisipasi akan berjalan apabila adanya kemauan dari setiap individu dan organisasi untuk ikut berperan serta dalam partisipasi.

Dari uraian teori diatas dijelaskan bahwa bentuk partisipasi yang digunakan peneliti ini secara langsung di Kecamatan Magelang Utara.

Dusseldorp (dalam Madikanto dan Soebiato 2013:84) beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain

d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat

e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan

f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Irene, 2011:61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program.

d. Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

#### **Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi itu berproses dan untuk membedakan prosesnya dibuatlah tangga/tingkatan partisipasi. Teori tingkat partisipasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembobotan terhadap tolak ukur tingkat partisipasi masyarakat. Konsep tingkat partisipasi masyarakat dari berbagai teori dan pengalaman dalam bidang perencanaan partisipatif. Tingkatan partisipasi menurut Hetifah Sj. Sumarto. Pendapat yang diutarakan oleh salah seorang praktisi lapangan dalam bidang perencanaan partisipatif di Indonesia yaitu Sumarto (2003:113). Melihat dari pengalaman praktis dari perencanaan partisipatif di beberapa kawasan Indonesia, Sumarto mengelompokkan tingkat partisipasi masyarakat menjadi 3 bagian yaitu :

1) Tinggi

a. Inisiatif datang dari masyarakat dan dilakukan secara mandiri mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan.

b. Masyarakat tidak hanya ikut merumuskan program, akan tetapi juga menentukan program-program yang akan dilaksanakan.

2) Sedang

a. Masyarakat sudah ikut berpartisipasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih didominasi golongan tertentu

b. Masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya, akan tetapi masih terbatas pada masalah keseharian.

3) Rendah

a. Masyarakat hanya menyaksikan kegiatan proyek yang dilakukan oleh pemerintah

b. Masyarakat dapat memberikan masukan baik secara langsung atau melalui media massa, akan tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan saja.

c. Masyarakat masih sangat bergantung kepada dana dari pihak lain sehingga apabila dana berhenti maka kegiatan secara stimulant akan terhenti juga.

#### **Padat Karya**

Padat Karya adalah suatu kegiatan yang memperkerjakan atau menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang relatif banyak. Tujuan Padat Karya:

a. Menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur dari keluarga miskin.

b. Mendayagunakan tenaga kerja, dan memberdayakan kemampuan masyarakat untuk bekerja.

c. Diperolehnya tambahan pendapatan atau penghasilan bagi tenaga kerja setengah menganggur dari keluarga miskin . (sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang).

Padat Karya adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat (penganggur, setengah penganggur dan miskin) melalui kegiatan pembuatan atau rehabilitasi infrastruktur sederhana maupun kegiatan produktif lainnya dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dalam rangka meningkatkan produktivitas, aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Program Padat Karya juga merupakan program yang terkait dengan program lainnya yaitu pemberdayaan masyarakat secara bersama-sama bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial masyarakat pedesaan. (Juknis Padat Karya Direktorat).

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan melakukan dengan

teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan panduan wawancara, dokumentasi, serta menganalisis data yang diperoleh di lokasi penelitian dan menjelaskan hasil data yang sudah diolah dan disimpulkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan teknik *purpose sampling* dalam menentukan informan penelitian ini.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Padat Karya**

Penelitian ini menggunakan bentuk partisipasi dalam program Padat Karya di

Kecamatan Magelang Utara yang meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan, dan partisipasi dalam evaluasi yang kemudian untuk mengetahui tingkat masyarakat apakah partisipasi masyarakatnya tergolong tinggi, sedang atau rendah.

##### 1) Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

a. Pelaksanaan musyawarah dalam pembentukan perencanaan pembangunan

Sebelum diadakannya sosialisasi di tiap-tiap Kelurahan, maka perencanaan kegiatan ini diadakan rapat musrenbang tingkat Kelurahan yang mana sebelum rapat tersebut diadakan rapat pra musrenbang yang merupakan musyawarah pembangunan masyarakat di tingkat RT dan RW. Masing-masing RT menyerahkan daftar identifikasi kebutuhan masyarakat sebagai hasil pra musrenbang ke kantor kelurahan, kemudian diajukan ke musrenbang tingkat Kecamatan yang akan ditindak lanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang dengan membuat usulan kegiatan Padat Karya yang dirancang ke rencana kerja/Renja Seksi Tenaga Kerja Mandiri dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja, kemudian dikumpulkan ke Bappeda Kota Magelang. Setelah menjadi Renja,

dengan usulan yang sudah dirangkum dengan disesuaikan jadwal perencanaan dan survei lokasi, yang mana pelaksanaan kegiatan Padat Karya tahun anggaran 2017, survei lokasi dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan program tersebut dijalankan yaitu di akhir tahun 2016. Setelah survei lokasi maka awal tahun 2017 membuat rencana gambar kerja yang kemudian akan terlihat lokasi mana dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam program Padat Karya tahun anggaran 2017.

Setelah rancangan tersebut selesai, Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Kecamatan Magelang Utara dan tiap-tiap Kelurahan untuk penyusunan tenaga kerja yang akan mengikuti program tersebut. Kemudian berkoordinasi membuat jadwal sosialisasi kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai calon pekerja Padat Karya.

##### b. Penyusunan Tenaga Kerja

Dalam penyusunan tenaga kerja dibentuk tim satuan kerja agar mudah untuk koordinasi secara kompleks yang merupakan seluruh anggotanya dari Kelurahan Kramat Utara. Penerimaan tenaga kerja dimulai dari pemberitahuan/pengumuman yang sudah terseleksi menjadi pekerja. Kemudian dari Kelurahan menunjuk siapa saja yang akan menjadi tim koordinasi pekerja dengan menentukan kriteria. Adapun tim satuan kerja program Padat Karya infrastruktur yaitu

terdiri dari mandor, kepala tukang, tukang, dan pekerja. Sedangkan tim satuan kerja program Padat Karya Non Bahan terdiri dari ketua kelompok dan pekerja.

##### 2) Partisipasi Dalam Pelaksanaan

a. Penggerakan Sumber Daya Manusia Partisipasi dalam pelaksanaan ini sangat dibutuhkan sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan pembangunan yakni dengan lebih banyak menggunakan tenaga dan pikiran manusia. Masyarakat di Kelurahan Kramat Utara yang mana terlibat

langsung didalam pelaksanaan program Padat Karya Infrastruktur maupun Non Bahan sangat antusias, saling mementingkan kebutuhan bersama dengan membantu, bekerja sama dan saling memiliki rasa gotong royong yang sangat tinggi. Melalui kegiatan tersebut maka dapat menentukan arah dan pengarahan terhadap tenaga kerja, sehingga dapat mendukung kegiatan secara sistematis yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Penggerakan sumber daya manusia di Kelurahan ini merupakan kegiatan memberi petunjuk agar mau bekerja sama secara efektif dan efisien, juga adanya tata cara untuk pengerjaannya agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja serta dapat memberdayakan masyarakat untuk dapat berpotensi dalam pengembangan pembangunan.

#### b. Sumber Dana dan Anggaran

Penentuan dana dan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dari mulai perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja selaku penyelenggara program Padat Karya. Tetapi pekerja di Kelurahan Kramat Utara yang menentukan apa saja dan alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan pembuatan bodi jalan dan pengerasan jalan dengan rabat beton berlokasi di RW 08 dan pembersihan walet/sampah yang berlokasi di RW 04 sungai manggis.

#### c. Kegiatan Administrasi

Kegiatan administrasi berpusat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang , dalam pelaksanaan program Padat Karya segala kegiatan adminisrasi dikeola oleh bendahara, baik dalam pencairan dana maupun pengalokasian dana. Adapun segala bentuk kegiatan, penyedia bahan material, kebutuhan peralatan dan lainnya yang membutuhkan anggaran yang dibuktikan dengan bukti penerimaan barang/bahan material, karena penyedia bahan material dan peralatan dari pihak ke tiga(CV) yang ditunjuk Dinas Tenaga Kerja untuk diajak kerjasama sebagai laporan kegiatan.

#### 3) Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Dalam pemanfaatan pembangunan setelah adanya program Padat Karya, masyarakat Kelurahan Kramat Utara belum ada jadwal khusus dan kegiatan khusus untuk pemeliharannya. Kemudian belum ada swadaya dari masyarakat karena program dari pemerintah untuk memanfaatkan serta mengembangkan pembangunan yang sudah terlaksana. Tetapi masyarakat hanya mengadakan kerja bakti setiap satu bulan sekali pada hari Minggu.

#### 4) Partisipasi Dalam Evaluasi

Tabel 1.3. Evaluasi Prgram Padat Karya tahun 2017

| No | Hal yang               | Cara melaksana                            | Pelaku pelaksa                   | waktu                       |
|----|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Pengadaan bahan materi | Kesesuaian antara perencanaan             | Panitia pengadaan/ pihak ke      | Saat pelaksanaan            |
| 2  | Pelaksanaan konstruksi | Kesesuaian antara volume jenis            | Pekerja                          | Saat pelaksanaan konstruksi |
| 3  | Penggunaan dana        | Kesesuaian antara perencanaan pembangunan | Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang | Sebelum dan saat p          |
| 4  | Penggunaan dan tah     | Kesesuaian antara pen                     | Masyarakat pengguna              | Selama ber                  |
| 5  | Pengamanan             | Kepastian tidak adanya da                 | Seluruh masyarakat               | Selama ada program          |

#### a. Hambatan-Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan Program Padat Karya

Kendala/hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan program Padat Karya tetapi tidaklah banyak karena bisa teratasi dengan baik. Guna peningkatan partisipasi di Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara adapun kendala/hambatan yang dihadapi yaitu sebagai berikut

- Adanya keterlambatan bahan material pada saat akan pelaksanaan

kegiatan, menjadikan pekerja menunggu dan masih santai belum mulai bekerja.

- Adanya informasi yang mendadak untuk permintaan bahan material menjadikan penyedia bahan material tergesa-gesa untuk pemesanan.
- Terjadinya kecemburuan sosial antarwarga karena usia yang menjadi kriteria Program Padat Karya ini. Masyarakat yang lanjut usia lebih dari 64 tahun merasa dirinya masih mampu melakukan pekerjaan tersebut padahal usia tersebut sudah tidak produktif lagi dalam bekerja seperti pelaksanaan pembangunan ini.

#### b. Keberhasilan dalam Pelaksanaan Program Padat Karya

Tahap partisipasi dalam evaluasi ini tentunya menentukan tujuan apakah sudah tercapai atau belum dari yang diharapkan. Dapat kita simpulkan bahwa program Padat Karya di Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Non Bahan sudah berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai target yang sudah direncanakan.

#### 5) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Padat Karya di Kecamatan

Magelang Utara khususnya di Kelurahan Kramat Utara

a. Dalam pengambilan keputusan atau perencanaan program Padat Karya yang berbasis masyarakat yang meliputi pelaksanaan rapat pembentukan panitia, dan penyusunan tenaga kerja. Dalam tahap ini peran pemerintah sebagai fasilitator sangatlah penting untuk mendampingi dan memberikan kontribusi kebijakan dalam penyelenggaraan serta perencanaan program. Dalam hal ini dengan memberikan pembinaan organisasi atau kelompok masyarakat, pemberian kesempatan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Sasaran dari tahap ini meningkatkan pengetahuan, kemauan, keterampilan, kemandirian dan memberdayakan masyarakat mengenai program Padat Karya untuk mengurangi

pengangguran dan kemiskinan. Dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat Kelurahan Kramat Utara dapat terlihat pada kesediaan mengikuti rapat perencanaan, sumbangan pikiran berupa usulan, saran, dan penentuan hasil musyawarah, dan ikut andil dalam penyusunan tim mengingat tingkat pengetahuan dan teknik perencanaan masyarakat yang masih kurang. Sehingga tingkat partisipasi masyarakatnya dapat dikatakan tinggi.

b. Tahap pelaksanaan program kegiatan Padat Karya berbasis masyarakat meliputi tahapan penggerakan sumber daya manusia, sumber dana/ anggaran, kegiatan administrasi, dan pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat terlihat pada kesediaan memberikan kontribusi tenaga masyarakat, karena kegiatan tersebut berupa pembangunan jalan di RW 08 Dalangan, Kelurahan Kramat Utara dan pembersihan walet/sampah-sampah yang berada di sepanjang jalan dan didalam sungai manggis. Keterlibatan masyarakat didalam setiap tahapan proses pembangunan dan pengelolaan prasarana yang berhasil dibangun akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga partisipasi masyarakat akan muncul dari kesadaran sendiri. Sehingga tingkat partisipasi masyarakatnya dapat dikatakan tinggi.

c. Dengan terlaksananya proses kegiatan program Padat Karya tersebut, dalam tahap pemanfaatan ini merupakan tahap dimana masyarakat merasakan dan menikmati hasil pembangunan yang telah terbangun. Terlepas dari hal tersebut diharapkan dalam pemeliharaan dan pengawasan untuk menjamin terpeliharanya fungsi pembangunan. Dalam tahap ini masyarakat dapat terlihat dalam penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pemanfaatan serta pemeliharaan dengan kerja bakti saja, yang akan diadakan setiap sebulan

sekali. Tetapi belum adanya swadaya dari masyarakat dalam pemnafaatan. Sehingga tingkat partisipasi masyarakatnya dapat dikatakan tinggi dalam pemanfaatan.

d.Tahap evaluasi meliputi kegiatan pemantauan program mulai dari pemilihan lokasi sasaran program sampai dengan hasil pembangunan program. Hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa secara menyeluruh, apakah sudah dilaksanakan sesuai perencanaan atau belum, penentuan keberhasilan suatu program berdasarkan atas penilaian masyarakat itu sendiri. Dengan adanya evaluasi dari masyarakat diharapkan dapat tercapainya suatu kesimpulan mana yang harus di perbaiki baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan program. Tidak hanya masyarakat tetapi pemerintah juga mempunyai evaluasi untuk keberlanjutan program tersebut. Partisipasi dalam evaluasi ini berbentuk sumbangan pikiran dan usulan saran pembangunan. Sehingga tingkat partisipasinya dapat dikatakan tinggi.

Secara keseluruhan bentuk tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara sangat tinggi dari mulai tahap pemngambilan keputusan sampai dengan evaluasi karena keterlibatan masyarakat sangat antusias, aktif dan masyarakat ikut berperan secara langsung dari mulai menghadiri rapat, mengemukakan pendapat secara mandiri serta ikut merumuskan dan mengusulkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian disamping hal tersebut, masyarakat berinisiatif untuk lebih giat dan sergap dalam melaksanakan kegiatan tersebut, tidak hanya setiap kali harus diarahkan dan disuruh tetapi masyarakat juga bergotong-royong. Sehingga masyarakat dapat diberdayakan dalam kegiatan Program Padat Karya

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Padat Karya di Kecamatan Magelang Utara khususnya di Kelurahan Kramat Utara merupakan program kebijakan dari pemerintah dari tahun ke tahun. Yang mana dalam menganalisis partisipasi masyarakat di Kecamatan Magelang Utara khususnya di Kelurahan Kamat Utara tingkat partisipasinya secara keseluruhan yaitu tinggi.

2. Adanya penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat dalam Program Padat Karya dari pemerintah. Sehingga masyarakat dapat diberdayakan dengan adanya program tersebut kemudian mengurangi tingkat pengangguran dan setengah menganggur karena kehilangan kesempatan kerja, terkena PHK dan dampak dari krisis perekonomian.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemandirian dalam melaksanakan program yang diselenggarakan pemerintah sehingga pemerintah dapat berupaya dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kecamatan Magelang Utara khususnya di Kelurahan Kramat Utara.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya program-program dari pemerintah, masyarakat di Kecamatan Magelang Utara khsusnya Kelurahan Kramat Utara, lebih meningkatkan partisipasi tidak hanya program dari pemerintah tetapi masyarakat dapat secara mandiri dengan memanfaatkan program-program yang sudah diberikan dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat agar terampil, partisipatif, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dan tidak bergantung kepada pemerintah saja.

2.Diharapkan adanya swadaya masyarakat untuk pemeliharaan setiap pembangunan yang dilaksanakan

berbentuk iuran rutin warga setempat guna perawatan pembangunan jalan di RW08 Dalangan, Kelurahan Kramat Utara.

3. Tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Magelang Utara khususnya Kelurahan Kramat Utara walaupun tinggi dalam pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga harus tinggi untuk menciptakan inovasi karya pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dengan diadakannya swadaya masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Djalal, Fasli & Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks*.
  - i. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- [2] Irene Astuti, Siti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset*
  - i. *Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press
- [4] Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan*. Jakarta: Bina Aksara
- [5] Mardikanto dan Subianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif*
  - i. *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- [6] Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan
  - i. *Obor*. Indonesia. Jakarta.
- [7] Sumodiningrat, Gunawan. 2003. *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta: Teruna Grafika.
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Aditama.
- [8] Sulistyorini, Nur Rahmawati dkk. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug*. Kabupaten Majangkela, Jurnal Volume 5, Nomor 1 (2015), diakses 23
  - i. Oktober 2017.
- [9] Lamalaka, Moh Andika. 2015. *Implementasi Kebijakan Zero Poverty*
  - i. *Program Padat Karya Di Kota Palu*. Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 9, Diakses pada September 2015
- [10] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- [11] PP No. 33 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 3 tentang Perluasan Kesempatan Kerja
- [12] Perda No. 14 tahun 2016 tentang APBD Kota Magelang tahun Anggaran 2017